



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG**

JALAN RAYA JATILAWANG NO 1 JATILAWANG



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya. Semoga dokumen yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bekepentingan.

Jatilawang, 4 September 2024



R. DIAN ANDYONO L.S., S.K.M., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19691006 19903 1 006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya. Semoga dokumen yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bekepentingan.

Jatilawang, 4 September 2024

CAMAT JATILAWANG

R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19691006 19903 1 006

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayann Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB V Penutup	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	8
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang	19
Tabel 2.3 Kegiatan dengan Target Terendah	25
Tabel 2.4 Rencana Program dan Prakiraan Maju Tahun 2025	27
Tabel 3.1 Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2024	39
Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatilawang Tahun 2024	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dan mewujudkan cita-cita pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2024 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;

18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 induk yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya sebagai pedoman Kecamatan Jatilawang dalam implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
 TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB II RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2024 dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jatilawang selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis capaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas rekapitulasi evaluasi hasil kerja tahunan dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kecamatan Jatilawang

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
															1		2		3		4									
															1	2	3	4	1	2	3	4								1
3	4	4A	5		6		7								8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp																	K	Rp
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																														
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86		85.75		86		86		86		0		80		90.05		88.75		88.75		103.2		88.75		103.2			
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																														
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
[PROGRAM]PROGRA M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.467.968.800	2.467.968.800	3.202.882.245	359.461.554	855.406.601	556.071.029	1.295.334.534	3.066.273.718	95.73														

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		2		1		1		1		1		0		0		2		200		4		400			
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.730.07 2.539		1.730.07 2.539		2.006.76 0.984		307.582 .914		727.684 .556		428.979 .396		480.555. 081		1.944.80 1.947		96. 91					
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	jenis	12		12		12		12		12		3		6		9		12		12		100		12		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.704.42 2.539		1.704.42 2.539		1.978.33 5.984		307.582 .914		718.684 .556		419.979 .396		473.805. 081		1.920.05 1.947		97. 05					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16		17		16		16		16		17		17		17		15		15		93.7 5		15		93.7 5	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							25.650.0 00		25.650.0 00		28.425.0 00				9.000.0 00		9.000.0 00		6.750.00 0		24.750.0 00		87. 07					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah							177.741. 670		177.741. 670		463.873. 670				29.817. 910		33.872. 400		359.806. 151		423.496. 461		91. 3					
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	5		6		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5.182.00 0		5.182.00 0		5.182.00 0				775.000		1.442.0 00		2.830.50 0		5.047.50 0		97. 4					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							29.916.0 00		29.916.0 00		35.162.0 00						7.246.5 00		27.815.5 00		35.062.0 00		99. 72					

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.223.670		10.223.670		9.245.670				1.140.000		3.350.000		3.254.670		7.744.670			83.77				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						86.390.000		86.390.000		171.973.000				21.265.000		10.472.000		120.766.034		152.503.034			88.68				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.665.000		7.665.000		7.915.000				140.000		1.916.900		3.690.550		5.747.450			72.61				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		6		9		225		9		225	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.365.000		38.365.000		234.396.000				6.497.910		9.445.000		201.448.897		217.391.807			92.75				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		0		4		4		4		3		1		3		6		13		325		13		325	
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											16.342.000								16.342.000		16.342.000			0				
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	2		2		2		2		2		0		0		0		2		2		100		4		200	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel																							0				

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4		2		4		4		4		0		0		0		0		0		0		2		50	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											16.342.000							16.342.000		16.342.000			0					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2		7		2		2		2		0		0		0		2		2		100		9		450	
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							373.999.591		373.999.591		366.775.591		51.878.640		93.450.135		83.581.733		130.461.702		359.372.210		97.98					
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jenis	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							45.693.751		45.693.751		45.693.751				10.982.175		5.763.773		22.576.422		39.322.370		86.06					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		0		12		12		12		3		3		3		3		12		100		12		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.650.000		4.650.000		4.650.000				4.650.000				4.650.000				100					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		0		4		4		4		1		0		0		0		1		25		1		25	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							323.655.840		323.655.840		316.431.840		51.878.640		77.817.960		77.817.960		107.885.280		315.399.840		99.67					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		0		12		12		12		3		3		3		3		12		100		12		100	

[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								184.580.000		184.580.000		349.130.000				4.454.000		9.637.500		308.169.600		322.261.100		92.3				
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	jenis	20		5		20		20		20		2		4		8		20		20		100		20		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							28.000.000		28.000.000		42.550.000				3.149.000		7.627.500		14.926.000		25.702.500		60.41				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10		10		10		10		10		8		6		13		7		34		340		44		440	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							16.580.000		16.580.000		16.580.000				1.305.000		2.010.000		7.120.000		10.435.000		62.94				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15		24		15		15		15		6		3		2		4		15		100		39		260	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							140.000.000		140.000.000		290.000.000								286.123.600		286.123.600		98.66				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		5		1		1		1		0		0		1		3		3		300		3		300	
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9.750.000		9.750.000		9.750.000																

[illegible]

[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								7.000.00 0		7.000.00 0		6.500.00 0				5.130.0 00				1.120.00 0		6.250.00 0		96. 15					
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jatilawang	%	10 0		100		10 0		10 0		10 0		10 0		100		100		100		100		100		100		100		
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							7.000.00 0		7.000.00 0		6.500.00 0					5.130.0 00				1.120.00 0		6.250.00 0		96. 15					
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	desa	11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		100		11		100		
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							5.500.00 0		5.500.00 0		5.000.00 0					5.000.0 00					5.000.00 0		100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7		0		7		7		7		7		7		7		7		7		100		7		100		
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							1.250.00 0		1.250.00 0		1.250.00 0					130.000				1.120.00 0		1.250.00 0		100					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		100		1		100		

[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							250.000		250.000		250.000														
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4		0	4	4		4		1		1		1		1		4		100		4		100
[PROGRAM]PROGRA M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							45.250.000		45.250.000		68.050.000				16.250.000		13.000.000		33.005.000		62.255.000		91.48		
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jatilawang	%	100		100	100	100		100		50		100		84		100		100		100		100		100
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							45.250.000		45.250.000		68.050.000				16.250.000		13.000.000		33.005.000		62.255.000		91.48		
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	1		6	1	1		1		1		2		0		1		1		100		1		100
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							45.250.000		45.250.000		68.050.000				16.250.000		13.000.000		33.005.000		62.255.000		91.48		

	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																										
[INDSUBKEGIATAN]		Laporan	2		0		2		2		2		1		1		1		1		4		200		4		200
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							15.240.000		15.240.000		15.240.000							15.000.000		15.000.000			98.43				
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jatiwang	%	100		100		100		100		100		100			100		100		100		100		100		100	
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							15.240.000		15.240.000		15.240.000							15.000.000		15.000.000			98.43				
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	desa	11		11		11		11		11		11			11		11		11		100		11		100	
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							240.000		240.000		240.000																
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2		0		2		2		2		1		0		1		0		2		100		2		100

[SUBKEGIATAN]7.01. 06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								15.000.000		15.000.000		15.000.000							15.000.000		15.000.000		100				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		100		1		100

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kecamatan Jatilawang

No	Aspek/Sub Kegiatan/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capaian	Satuan	Realisasi Sampai Tahun 2022	Tahun 2023						Tingkat Capaian RKPD 2023 s.d. Triwulan IV	Status Capaian 2023	Identifikasi		Ket.	OPD	
					Target 2023	Realisasi 1	Realisasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4	Realisasi 2023 s.d. Triwulan IV			Permasalahan	Rekomendasi			
Sub Kegiatan 1	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	3	3	0	0	3	0	3	100	●			Pada Tri Wulan tiga point no 1 seharusnya Dokumen Resntra Perubahan		
Sub Kegiatan 2	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	2	1	1	1	0	0	2	200	●					
Sub Kegiatan 3	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
3.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NON KUMULATIF/POSITIF	Orang/bulan	17	16	17	17	17	15	15	93.75	▶			Gaji ASN yang dibayarkan 17 orang pada bulan Oktober , pada bulan Nopember dan Desember		

																	berkurang 2 karena pensiun jadi 15 orang		
Sub Kegiatan 4	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
4.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KUMULATIF/POSIT IF	Dokumen	0	4	1	1	1	1	4	100						Dokumen SPM Honor pengelola Keuangan		
Sub Kegiatan 5	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
5.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100						Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada triwulan IV terealisasi 1 Paket		
Sub Kegiatan 6	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
6.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100						Realisasi Triwulan IV : Terdapat 1 Paket yang terdiri dari: 1. Belanja ATK, 2 Kertas dan Cover 3. Belanja Benda Pos 4. Belanja Bahan Komputer		
Sub Kegiatan 7	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
7.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100						Jumlah Jenis alat rumah tangga yang terealisasi pada triwulan IV yaitu belanja bahan isi tabung dan pembersih lantai, dan piring obat-obatan Rondap		
Sub Kegiatan 8	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
8.1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100						Realisasi Triwulan IV Belanja 1 paket terdiri dari : Belanja BBM 3 Dokumen (bulan okt-des) , Belanja makan minum Rapat , Belanja Minuman jamuan tamu , Belanja Bahan Natura		

Sub Kegiatan 9	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
9.1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Paket	0	4	1	1	1	6	9	225					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang trealisasi Triwulan IV Belanja 6 buah Banner (POKIR)	
Sub Kegiatan 10	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
10.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KUMULATIF/POSIT IF	Laporan	0	4	3	1	3	6	13	325					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada triwulan IV adalah : 1. Perjalanan Dinas sekitar Purwokerto serta Dinas Luar Daerah ke NTT (Labuhan Bajo) , 2.Jogja Bantul 3. Bantul Slemgan 4. Bandung (Pemprof) , 5. Bandung (Desa Wisata Lokal Cibodas 6. Jakarta jumlah 6 Laporan (5 DL dana POKIR)	
Sub Kegiatan 11	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel																
Sub Kegiatan 12	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
12.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Unit	7	2	0	0	0	2	2	100					Belanja pengadaan satu paket CC TV Rp. 12. 492.000 , hardis exsternal Rp 3.850.000	
Sub Kegiatan 13	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
13.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KUMULATIF/POSIT IF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100					Laporan Pembayaran Langganan Air, Telepon, listrik, internet, surat kabar selama bulan 1. Oktober 2. Nopember 3. Desember	
Sub Kegiatan 14	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

14.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	4	1	0	0	0	1	25	▼	terdapat kesalahan target		Dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun			
Sub Kegiatan 15	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
15.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100	●			Realisasi Triwulan III terbayarnya Honor Non ASN Tenaga Administrasi, Pengemudi, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan 1. Laporan Bulan Oktober 2. Laporan Bulan Nopember 3. Laporan Bulan Desember			
Sub Kegiatan 16	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
16.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KUMULATIF/POSITIF	Unit	10	10	8	6	13	7	34	340	●	kesalahan dalam penentuan target, hanya 10 kendaraan tidak memperhitungkan berapa kali pemeliharaannya		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1. Pemeliharaan kendaraan Roda empat 2 unit 2. Pajak kendaraan roda dua 3 unit 3. Pemeliharaan Roda dua 3 unit			
Sub Kegiatan 17	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
17.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KUMULATIF/POSITIF	Unit	24	15	6	3	2	4	15	100	●			Pemeliharaan Serfis Leptop 1 unit , printer AC 3 unit			
Sub Kegiatan 18	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
18.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NON KUMULATIF/POSITIF	Unit	5	1	0	0	1	3	3	300	●			Rehab bangunan Pagar keliling dan gorong2 depan , dapur ex rumah dinas wedana (POKIR)			
Sub Kegiatan 19	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	

19.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan yang trealisasi Triwulan II 1. Laporan Pelayanan Adminduk (Okt. - Des.) = 1 laporan 2. Laporan Pelayanan Legalisasi Umum (Okt. - Des.) = 1 laporan 3. Laporan Pelayanan Umum (Okt - Des.) = 1 laporan		
Sub Kegiatan 20	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
20.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	7	1	3	3	2	9	128.57				1. Laporan Realisasi PBB bulan Oktober s/d Desember terealisasi 74.12 %		
Sub Kegiatan 21	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
21.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NON KUMULATIF/POSITIF	Lembaga	0	7	7	7	7	7	7	100				Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrembang : RT, RW, PKK, Karang Taruna, KWT, Posyandu, LPMD		
Sub Kegiatan 22	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
22.1	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	1	0	0	0	1	1	100				1. Dokumen kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
Sub Kegiatan 23	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

23.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	4	1	1	1	1	4	100	●			1 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 1 kegiatan dari bulan Oktober sampai dengan Desember		
Sub Kegiatan 24	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
24.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	2	1	1	1	1	4	200	●			. Laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa TW IV (tambahan dari POKIR)		
Sub Kegiatan 25	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
25.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	2	1	0	1	0	2	100	●			Digeser ke Logistik		
Sub Kegiatan 26	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
26.1	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	1	0	0	0	1	1	100	●			Satu dokumen Pelaksanaan Pilkades pada tanggal 23 Oktober		

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

a. Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang baik belanja operasional maupun belanja modal sebesar Rp. 3.302.422.245 dimana belanja pegawai sebesar Rp. 1.728.572.539 dan belanja barang dan jasa Rp. 816.636.261 dengan 5 program dan 9 kegiatan serta 25 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar 3.149.778.718 dengan belanja pegawai sebesar 1.9.001.947 dan belanja Barang dan Jasa sebesar 950.634.671. Capaian kinerja fisik sebesar 97,01 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,22 %.

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggungjawabnya. Gambaran keberhasilan capaian, tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Capaian indikator utama dari program dan kegiatan di Kecamatan Jatilawang sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan, masih ada yang dibawah target dan ada yang melampaui target. Namun, untuk capaian sub kegiatan masih terdapat beberapa yang masih belum mencapai target minimal bahkan ada yang belum sama sekali dilakukan.

Tabel 2.3

Kegiatan Dengan Target Terendah

No	Nama Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	93,75 %	2 Pegawai ASN pensiun

Faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target kegiatan dan sub kegiatan:

1. Pegawai pension,
2. Perubahan dan pergeseran anggaran

Kebijakan atau tindakan yang diambil dalam mengatasi penyebab tidak tercapainya kegiatan yaitu pengisian pegawai yang kosong. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena saat kekosongan pegawai bebarengan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Banyumas yang berakhir pada 24 September 2023. Sedangkan pegawai yang mengalami pensiun dimulai sejak 1 November 2023. Setelah berakhirnya masa jabatan bupati, Kabupaten Banyumas di kepalai oleh Pejabat Bupati Banyumas, dimana Pejabat Bupati Banyumas tidak bisa serta merta mengangkat pejabat, harus terlebih dahulu melalui persetujuan Mendagri.

Tabel 2.4
Rencana Program dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
KECAMATAN JATILAWANG						2,924,814,000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					62,550,000	
7.01	KECAMATAN					62,550,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks		86.5 Indeks	9,200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	Kab. Banyumas	100%	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	Kab. Banyumas	100%	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	Kab. Banyumas	100%	7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			Kab. Banvumas		7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit		1 Unit		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Kab. Banyumas	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100%	Kab. Banyumas	100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Banyumas	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11 Laporan	Kab. Banyumas	11 Laporan	5,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%		100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	Kab. Banyumas	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Banyumas	2 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Kab. Banyumas	2 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%		100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	Kab. Banyumas	100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	Kab. Banyumas	37 Orang	7,500,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	37 Orang	Kab. Banyumas	37 Orang	3,650,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%		100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	Kab. Banyumas	100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Banyumas	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	Kab. Banyumas	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	Kab. Banyumas	6 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	Kab. Banyumas	0 Dokumen	-	KECAMATAN JATILAWANG
X	NON URUSAN					2,862,264,000	

X.XX	NON URUSAN					2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Banyumas	7 Dokumen	4,661,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Banyumas	3 Dokumen	2,368,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	2,293,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	Kab. Banyumas	100%	2,106,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	Kab. Banyumas	18 Orang/Bulan	2,076,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Banyumas	12 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Kab. Banyumas	100%	165,414,584	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Banyumas	5 Paket	6,255,884	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Banyumas	1 Paket	31,686,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Banyumas	3 Paket	10,416,500	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Banyumas	12 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Banyumas	5 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	85,856,200	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Banyumas	2 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	Kab. Banyumas	100%	50,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	20,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	Kab. Banyumas	100%	418,393,751	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	50,693,751	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Laporan	Kab. Banyumas	27 Laporan	7,700,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	360,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Kab. Banyumas	100%	117,189,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Banyumas		77,840,000	KECAMATAN JATILAWANG

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Banyumas	20 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Banyumas	3 Unit	19,350,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	4,999,000	KECAMATAN JATILAWANG

2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis Perangkat Daerah

“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintahan. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif dan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam realitanya, masalah pelayanan publik masih menjadi pusat perhatian dan masih banyak yang menganggap kurang optimal. Atau dengan kata lain masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan yang ada saat ini. Beberapa masalah yang masih timbul yaitu masih kurang efisien, lamban, dan waktu penyelesaian. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik adalah faktor SDM, tata, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi, teknologi informasi dan aturan yang diberlakukan.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dibenahi pemerintah. Khususnya pemerintah kecamatan yang terlibat langsung dalam pelayanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, kecamatan perlu memperbaiki pelayanan yang telah ada menjadi pelayanan yang lebih berkualitas.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Kecamatan Jatilawang mempunyai tugas peran strategis di bidang Pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, terdiri dari:
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Seksi Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Desa;
6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantu.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c) koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

- d) koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan.
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e) koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f) koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g) koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i) pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- j) penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan adalah pelayanan non perizinan yang meliputi:

- 1) Pembuatan KTP Elektronik;
- 2) Pembuatan KK;
- 3) Pembuatan Surat Keterangan Pindah;
- 4) Pembuatan Akte Kelahiran;
- 5) Pembuatan Akte Kematian;
- 6) Pembuatan KIA;
- 7) Administrasi non Kependudukan

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2024

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T - 1	Tahun				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jatilawang									Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713	
7	01				KECAMATAN				Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.894.754.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.894.754.713	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.294.937.838	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.294.937.838	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.280.637.838	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.280.637.838	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp14.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.300.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp167.067.284	Rp0	Rp0	Rp0	Rp167.067.284	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp5.144.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.144.500	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp32.075.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.075.500	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp9.736.884	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.736.884	

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp78.710.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.710.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp7.665.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.665.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp33.735.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.735.400	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp378.349.591	Rp0	Rp0	Rp0	Rp378.349.591	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp45.693.751	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.693.751	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp323.655.840	Rp0	Rp0	Rp0	Rp323.655.840	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp49.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.900.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp49.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.900.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	

Tabel 3.2

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jatilawang Tahun 2024

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																	
Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T 1	Jumlah											Bertambah / Berkurang)		T 1
				Tahun													
				Sebelum					Setelah								
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Jatilawang				Rp2.944.254.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.944.254.713,00	Rp2.863.271.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.863.271.715,00	(Rp80.982.998,00)	(2.83)		
UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.944.254.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.944.254.713,00	Rp2.863.271.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.863.271.715,00	(Rp80.982.998,00)	(2.83)		
KECAMATAN				Rp2.944.254.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.944.254.713,00	Rp2.863.271.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.863.271.715,00	(Rp80.982.998,00)	(2.83)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.894.754.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.894.754.713,00	Rp2.790.866.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.790.866.215,00	(Rp103.888.498,00)	(3.72)		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp4.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.573.000,00	Rp73.000,00	1.60		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0.00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.000,00	Rp73.000,00	100.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.294.937.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.294.937.838,00	Rp2.218.064.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.218.064.840,00	(Rp76.872.998,00)	(3.47)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.280.637.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.637.838,00	Rp2.195.504.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.195.504.840,00	(Rp85.132.998,00)	(3.88)		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.300.000,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp8.260.000,00	36.61		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp167.067.284,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.067.284,00	Rp139.508.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.508.784,00	(Rp27.558.500,00)	(19.75)		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.144.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.144.500,00	Rp5.144.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.144.500,00	Rp0,00	0.00		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.075.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.075.500,00	Rp32.075.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.075.500,00	Rp0,00	0.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.736.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.736.884,00	Rp10.636.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.636.884,00	Rp900.000,00	8.46	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp78.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.710.000,00	Rp67.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.300.000,00	(Rp11.410.000,00)	(16.95)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.665.000,00	Rp6.162.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.162.200,00	(Rp1.502.800,00)	(24.39)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.735.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.735.400,00	Rp18.117.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.117.200,00	(Rp15.618.200,00)	(86.21)	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.500,00	Rp72.500,00	100.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	0.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp378.349.591,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.349.591,00	Rp375.849.591,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.849.591,00	(Rp2.500.000,00)	(0.67)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.693.751,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.693.751,00	Rp43.193.751,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.193.751,00	(Rp2.500.000,00)	(5.79)	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp323.655.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.655.840,00	Rp323.655.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.655.840,00	Rp0,00	0.00	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp49.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.900.000,00	Rp52.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.870.000,00	Rp2.970.000,00	5.62	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.900.000,00	Rp45.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.700.000,00	(Rp4.200.000,00)	(9.19)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.490.000,00	Rp6.490.000,00	100.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp340.000,00	100.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp340.000,00	100.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp672.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp672.500,00	Rp672.500,00	100.00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp375.000,00	100.00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp375.000,00	100.00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	100.00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	100.00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500,00	Rp87.500,00	100.00	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500,00	Rp87.500,00	100.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	100.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	100.00	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	100.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp11.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.875.000,00	Rp1.875.000,00	15.79	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp11.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.875.000,00	Rp1.875.000,00	15.79	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp1.875.000,00	100.00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp39.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.500.000,00	Rp58.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.525.000,00	Rp19.025.000,00	32.51	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp39.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.500.000,00	Rp58.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.525.000,00	Rp19.025.000,00	32.51	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.500.000,00	Rp58.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.000.000,00	Rp18.500.000,00	31.90	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp525.000,00	100.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	100.00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	100.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	100.00	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	100.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000,00	Rp133.000,00	100.00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000,00	Rp133.000,00	100.00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.000,00	Rp73.000,00	100.00	

Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Banyumas, Jatilawang, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	100.00	
--	----------------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--

Di tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan namun dalam penganggaran masih belum teralokasikan anggaran kegiatannya sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menunjang capaian yang sudah menjadi rencana kerja Kecamatan Jatilawang. Rician rencana kerja yang mengalami perubahan yang dilakukan yaitu:

- Program:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- Sub Kegiatan:
 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 10. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 11. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 12. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta;
 13. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
 14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
 15. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 16. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 17. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 18. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 19. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Jatilawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun sumber lain;
2. Kecamatan Jatilawang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024;
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita Kabupaten Banyumas menuju “Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari”

Jatilawang, 4 September 2024



R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19691006 19903 1 006